

REKONSTRUKSI PERTAHANAN JEPANG TERHADAP KONTINGENSI KAWASAN ASIA TIMUR

Oleh: Aditya Prabowo

adityaprabowo101@gmail.com

Dosen Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP., MA

Bibliografi: 24 Jurnal, 22 Buku, 9 Dokumen Resmi, 10 Situs

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

One of the main challenges in Japan's defense is the risk of a security dilemma due to the contingency that occurs in the East Asia Region, because each country needs to take action for reasons that have a defensive motive, including Japan. The increasingly challenging security environment of the East Asia Region has brought about drastic changes for Japan recently with its defense rebuilding efforts and Japan's national security policy. By maintaining its basic stance as a peace-loving country, Japan is expected to play a more active role in regional security.

In this study, the authors used library research methods and qualitative research. The analysis in this study uses a nation-state level analysis, using the concept of the Security Dilemma, within the framework of the deterrence theory. The perspective in this study uses the perspective of structural realism—neorealism.

The findings show that Japan's current foreign policy of adopting Deterrence can be reconstructed towards Extended deterrence and will continue to develop as Japan's reaction to the contingency that occurs in East Asia and the role of the growing Japan-US alliance is. With a rebuild defense that complies with Japan's constitutional limitations as well as increasing Japan's offensive capabilities, will help Japan contribute more to peace and deterrence in the East Asia Region.

Keyword(s): *Japan Defenses, Contingency, Deterrence Theory*

PENDAHULUAN

Praktik hubungan internasional, serta keamanan terkait dengan sebuah negara kurang lebih akan aman pada tingkatan ketika suatu negara bisa memastikan keberlangsungan hidupnya dalam sistem internasional. Perubahan situasi internasional terkadang memaksa suatu negara untuk melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan *deterrence* (*Deterrence*) dan perubahan kebijakan negara di bidang keamanan dengan alasan untuk tujuan pertahanan. Hal yang berkaitan dengan keberadaan perubahan probabilitas ancaman (*Kontingensi/Contingencies*), dimana ancaman ini dipandang sebagai sesuatu hal atau peristiwa yang menantang serta mengganggu stabilitas suatu negara dan instrumennya.

Kajian terkait keamanan sangat berkaitan erat dengan keberadaan ancaman atau *threats* dimana keamanan bagi adalah tindakan guna mempertahankan stabilitas dari hal yang mengancam bahkan secara signifikan mempersempit berbagai pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah, individu, hingga badan pemerintah swasta dalam suatu negara.¹ Kekuatan militer menjadi hal yang penting dalam menjamin kelangsungan suatu negara dari ancaman internal maupun eksternal. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya menjadikan negara seringkali terlihat agresif dalam aktivitasnya di suatu kawasan. Salah satunya adalah kawasan Asia Timur, dimana merupakan sebuah kawasan yang penuh dengan dinamika seperti

ketegangan politik, konflik wilayah, persaingan ekonomi serta menghadapi perubahan penting dalam kekuatan militer antar-negaranya.

Sejak tahun 1945, Konstitusi Jepang mencantumkan cita-cita pada preservasi perdamaian serta menghindari segala macam bentuk peperangan, opresi, tirani, perbudakan, dan lain sebagainya yang perlu dicapai oleh negara. Berdasarkan cita-cita yang tinggi ini, Jepang mengeliminasi segala bentuk peperangan maupun potensi terhadapnya dengan cara menghapus *hak belligerency* yang dituangkan dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang. Melalui hal tersebut, maka Jepang tidak memiliki kekuatan militer layaknya negara lain. Hal ini yang kemudian menjadikan "*Pasifisme*" melekat pada identitas keamanan maupun identitas Jepang sebagai suatu negara.²

Melihat adanya perubahan pada kebijakan luar negeri Jepang tersebut, peneliti melihat adanya urgensi dalam pembahasan isu ini karena hal tersebut akan memengaruhi bagaimana hubungan antara Jepang dengan negara lainnya, terutama dengannegara-negara di kawasan Asia Timur dan juga memengaruhi bagaimana peran Jepang dalam menjaga stabilitas perdamaian, baik di tingkat Kawasan maupun global. Di tahun 2014 Abe mampu merubah intepretasi terhadap pasal 9 dalam konstitusi Jepang yang memperbolehkan Jepang untuk mengerahkan kapabilitas militernya di luar teritori Jepang dengan tujuan

¹ Richard, H. Ullman. (1983). *Redefining Security, International Security*. 8, 1, hal. 15-21.

² Umeda, S. (2006). Japan, Article 9 of the Constitution. Law Library of Congress.

membantu sekutunya apabila terlibat dalam masalah atau sedang terancam.³

Di masa modern saat ini, tidak dapat dipungkiri pula bahwa kawasan Asia Timur menjadi salah satu kawasan yang masih berada dalam kontingensi wilayah sehingga arah dan sikap ini menimbulkan berbagai macam perdebatan baik pada tingkat domestik maupun internasional.⁴



Gambar 1.1 Peta Tensi Kawasan Asia Timur

Sejumlah tren militer-keamanan regional yang signifikan muncul di Asia Timur. Aspek kunci dari tren ini adalah upaya Tiongkok untuk secara aktif membentuk dinamika keamanan regional. Kontingensi kawasan telah meningkat di Asia Timur sejak 2008, terutama karena kekhawatiran terkait sengketa wilayah maritim, ketegasan strategis Tiongkok, proliferasi nuklir, pembangunan mili-

ter di kawasan itu. Tren pengeluaran militer regional menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah dengan Tiongkok telah meluncurkan program modernisasi militer. Dengan Amerika Serikat mengembangkan hubungan militer dan keamanan yang lebih kuat dengan sekutu di kawasan sebagai bagian dari strategi poros ke Asia.

Hari ini, meskipun Korea Utara memiliki rudal bersenjata nuklir, Korea Utara menahan diri untuk tidak menggunakannya. Ini karena Pyongyang memahami bahwa berbagai tindakan pembalasan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan akan menjadi konsekuensi dari penggunaan tersebut. Dilihat dalam konteks ini, peningkatan pertahanan rudal Jepang hingga saat ini telah meningkatkan ketahanan masyarakat Jepang terhadap tekanan nuklir dan secara keseluruhan berkontribusi pada upaya *deterrence* melawan Korea Utara. Tetapi faktanya juga tetap bahwa sementara denuklirisasi di semenanjung Korea tidak menunjukkan kemajuan, Korea Utara terus mengembangkan dan meningkatkan persenjataan rudal mereka. Jelas bahwa waktu tidak berpihak pada Jepang dalam situasi ini.

Tiongkok, sementara itu, telah datang untuk menghadirkan Jepang dengan ancaman kontingensi yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Korea Utara mencoba untuk mengubah keadaan saat ini, ambisi teritorialnya terbatas di Semenanjung Korea. Tiongkok, bagaimanapun, berusaha untuk memperluas lingkup pengaruhnya dan mengubah *status quo* di setiap kesempatan yang diberikan,

³ Adam P. Liff, "How Specifically Does Japan's LDP Want to Revise the Constitution?" *The Diplomat*, 14 Juli, 2016, diakses 5 Desember, 2020, <https://thediplomat.com/2016/07/how-specifically-does-japans-ldp-want-to-revise-the-constitution/>

⁴ John H. Herz (1950). "Idealist Internationalism and Security Dilemma", *World Politics*, Vol.2, hal 157

sesuatu yang telah diperjelas oleh tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Juga jelas bahwa jenis perkembangan yang sama dapat terjadi antara Cina dan Jepang. Jepang dan Amerika harus bekerja sama untuk mengambil sikap *deterrence* dari Tiongkok yang akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengubah status quo.

Selama bertahun-tahun Jepang berpegang pada kebijakan berorientasi pertahanan eksklusif (*Senshu bouei*)" dan konsep kekuatan pertahanan dasar (*Kibanteki Boueiryouku*), berkonsentrasi pada dirinya sendiri daripada berkomunikasi dengan lawan potensial dalam hal menyusun pendekatan strategis. Jepang berhasil meraba-raba melalui era Perang Dingin, tetapi hari ini, pendekatan ini tidak akan cukup. Jika Jepang gagal menyampaikan pesan yang jelas, dan China menafsirkannya sebagai adanya kekosongan kekuasaan, sudah pasti akan memanfaatkannya untuk memperluas lingkup pengaruhnya sendiri. Ini bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan Jepang semata-mata dalam konteks penguasaan Kepulauan Senkaku. Sama seperti Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, Senkaku mungkin merupakan benteng simbolis di Laut Cina Timur, tetapi bagi Cina yang berkembang pesat, mereka hanyalah titik kecil di peta yang terus melebar. Bukanlah tugas kita untuk menghentikan kebangkitan China di panggung dunia. Kenaikan ini juga tidak akan berlanjut selamanya. Namun, dalam waktu dekat, tekanan yang ditimbulkan oleh kebangkitan Beijing pasti akan terus berlanjut, dan bahkan jika kita memasuki fase di mana kekuatan Tiongkok mulai

berkurang, ini mungkin akan disertai dengan periode ketidakstabilan yang berlangsung lama. Oleh karena itu, jika kita ingin menjaga perdamaian dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada perang, Jepang harus memikirkan *deterrence* secara serius.

Jepang pada Pemerintahan Abe telah mempromosikan reformasi komprehensif dari kebijakan pertahanan Jepang. Abe terus mempromosikan reformasi kelembagaan dan konstitusional yang memungkinkan rekonstruksi kebijakan pertahanan Jepang. Upaya untuk mengubah konstitusi pasifis Jepang pasca Perang Dunia II telah memicu reaksi negatif di Cina dan Korea Selatan, sementara AS telah mendorong potensi kontribusi Jepang yang lebih besar untuk keamanan regional. Hal ini terlihat dari potensi anggaran militer yang digelontorkan oleh Jepang sebagai bentuk respon serius terhadap meningkatnya tensi kontingensi di Asia Timur.

Sehubungan dengan adanya kontingensi keamanan di Kawasan Asia Timur yang menjadi penyebab atas kebijakan rekonstruktif politik luar negeri Jepang, penelitian akan berfokus pada pembahasan mengenai rekonstruksi kebijakan pertahanan dan konsep *extended deterrence* sebagai salah satu tindakan rekonstruksi identitas keamanan negara yang terwujud dalam hubungan Jepang-Amerika Serikat dalam merespon fenomena kontingensi.

KERANGKA TEORI

Penulis menggunakan perspektif Neorealisme dalam penelitian ini. Neorealisme muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat

dasar manusia (*human nature*) sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional. Neorealisme menganggap desain dari struktur internasional adalah anarki. Hal ini ditandai dengan tidak adanya otoritas yang mengatur relasi antara negara. Dalam kondisi anarki, potensi suatu negara untuk menyerang atau diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi. Kondisi ketidakpastian yang dialami setiap negara dalam politik internasional tersebut yang menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai kapabilitas keamanan (*security*) dan kekuatan (*power*) semaksimal mungkin.⁵

Neorealisme berasumsi bahwa negara adalah aktor yang rasional maka selalu mengejar strategi yang meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Neorealis memaparkan bahwa negara dituntut untuk meningkatkan kapabilitas negaranya untuk bertahan dalam kondisi yang anarki. Hal tersebut didasari oleh situasi dunia yang anarki dan mengharuskan suatu negara dapat bersaing dalam menjaga eksistensi kapabilitas negaranya.⁶

Teori yang penulis gunakan ialah teori *Deterrence Theory*. *Deterrence Theory* pertama kali dikembangkan oleh Cesare Beccaria (Italia)

⁵Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016), 81.

⁶ Keohane, Robert. O. 1986. "Neorealism and Its Critics" dalam *Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond*, New York: Columbia University Press.

dan Jeremy Bentham (Inggris) pada abad ke 18. Hal pokok yang mendasari *Deterrence Theory* adalah bahwa ancaman hukuman diharapkan dapat menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan dan minimal dapat mengurangi tingkat pelanggaran di masyarakat. Menurut Charles W. Kegley Jr. dan Eugene R. Wittkopf, deterrence adalah keyakinan akan kemampuan strategis untuk menghindari atau mencegah diri dari serangan lawan, dan percaya bahwa tindakan militer terhadap negara tidak layak dilakukan.

Memperkuat *Extended Deterrence* melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk meyakinkan calon agresor bahwa pembela jarak jauh pasti akan menanggapi serangan, atau setidaknya secepat mungkin sesuai dengan hukum nasional. Langkah-langkah tersebut termasuk tindakan seperti menempatkan sejumlah besar pasukan dari negara yang menghalangi di wilayah negara yang terancam, seperti yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam banyak kasus. Pembela berusaha untuk menciptakan persepsi bahwa, pada dasarnya, tidak ada pilihan selain merespons jika sekutunya diserang.

Beberapa pakar hubungan internasional berpendapat bahwa *security dilemma* adalah sumber paling penting dari konflik antar negara. Mereka berpendapat bahwa di ranah internasional, tidak ada monopoli kekerasan yang sah —yaitu, tidak ada pemerintahan dunia—dan, sebagai konsekuensinya, setiap negara harus menjaga keamanannya sendiri. Untuk alasan ini, tujuan utama negara adalah

untuk memaksimalkan keamanan mereka sendiri.⁷ Namun, banyak tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan itu—seperti pengadaan senjata dan pengembangan teknologi militer baru—akan menurunkan keamanan negara lain. Penurunan keamanan negara lain tidak otomatis membuat dilema, tetapi negara lain akan cenderung mengikuti jika salah satu negara mempersenjatai diri. Mereka tidak dapat mengetahui apakah negara bersenjata akan menggunakan peningkatan kemampuan militernya untuk serangan di masa depan.

Untuk alasan ini, mereka akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuatan atau mereka akan meluncurkan serangan-serangan preemptive untuk mencegah negara mempersenjatai dari mengganggu keseimbangan di tempat pertama. Jika mereka memilih opsi pertama, hasilnya mungkin spiral keamanan, di mana dua (atau lebih) negara terikat dalam perlombaan senjata, dengan masing-masing negara menanggapi peningkatan pengadaan senjata dan pengeluaran pertahanan oleh negara lain, memimpin mereka berdua untuk mempersenjatai diri lebih dan lebih berat. Situasi itu dapat menyebabkan perang dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis berfokus pada apa rekonstruksi pertahanan Jepang terhadap kontingensi Kawasan Asia Timur.

⁷ Wivel, A., 2011. Security dilemma. *International Encyclopedia of political science*, 7, pp.2389-91.

Memetakan Kekuatan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Jepang

Perkembangan militer Jepang pasca Perang Dunia II sangat bertolak belakang dengan politik internasionalnya. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan Jepang membangun perekonomiannya pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II tidak sejalan dengan kekuatan militer untuk menopang posisinya dalam percaturan politik dunia. Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, hal tersebut mengubah figure Jepang menjadi negara non militeristik. Kekuatan militer yang menjadi penyokong Jepang di kancah peperangan di demiliterisasi dengan mencabut hak-hak atas kepemilikan angkatan bersenjata dan potensi perang lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan konstitusi baru Jepang pasca Perang Dunia II. Meski pada akhirnya, Jepang diperbolehkan memiliki perangkat pertahanannya dengan dibentuknya Japan Self Defence Force (JSDF) atau pasukan bela diri yang berperan dalam menjaga internal Jepang. Dalam perkembangannya, kesadaran berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat, dorongan dari sekutunya Amerika Serikat dan konteks internasional yang terus berubah membuat Jepang akhirnya mempertimbangkan untuk mulai mengubah postur militer pertahanan dan keamanannya.

Secara tradisional, pengeluaran militer Jepang telah dibatasi sekitar 1% dari produk nasional brutonya, meskipun ini menurut praktik populer, bukan hukum, dan angka ini berfluktuasi. JSDF perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang cukup besar, dan Je-

pang sekarang memiliki anggaran militer terbesar kesepuluh di dunia.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Anggaran Militer Jepang



Sumber: *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security 2020* (diolah)

Data dari *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, menunjukkan kecenderungan tren Jepang dalam mengoptimalkan anggaran belanja pertahanan negara. Tren kenaikan anggaran ini juga menunjukkan bagaimana sikap Jepang selama ini dalam merespon ketidakpastian situasi di Kawasan Asia Timur. Jepang masih menjadi negara yang menganut prinsip pasifis namun terdapat indikasi bahwa Jepang sedang berupaya untuk merubah perihal terse-

but. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh kementerian pertahanan Jepang di tahun 2018, Jepang pernah melakukan pemotongan pengeluaran untuk pertahanan di tahun 2002 hingga 2012 (4,94 triliun yen menjadi 4,65 triliun yen) namun pengeluaran pertahanan Jepang kembali meningkat di tahun 2012 hingga 2018 (4,65 triliun yen menjadi 4,94 triliun yen), kembali seperti jumlah pengeluaran pertahanan Jepang di tahun 1997 (4,94 triliun yen).⁸

Rekonstruksi Pertahanan Jepang: *Extended Deterrence*.

Deterrence dapat digunakan dalam dua situasi. Pertama, *Direct Deterrence* adalah upaya negara untuk mencegah serangan di wilayahnya sendiri—dalam kasus Jepang, di dalam batas wilayah Jepang sendiri. Kedua, *Extended deterrence* adalah komitmen untuk mencegah dan, jika perlu, untuk menanggapi di seluruh spektrum skenario nuklir dan non-nuklir potensial untuk membela sekutu dan mitra. Komitmen ini sering digambarkan sebagai menyediakan “*Nuclear Umbrella*.”⁹

Deterrence dapat digunakan dalam dua situasi. Pencegahan langsung terdiri dari upaya negara untuk mencegah serangan terhadap wila-

⁸ Japan Ministry of Defense. Defense Program and Budget of Japan Overview of FY2018 Budget, Desember 2017, 3.

⁹ Yoshida, F., 2018. *From the reality of a nuclear umbrella to a world without nuclear weapons: an interview with Katsuya Okada*. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1(2), pp.474-485.

yahnya sendiri. Akhirnya, literatur teoretis membedakan antara dua periode waktu yang tumpang tindih di mana kebijakan pencegahan dapat diterapkan.

1. *General Deterrence* adalah upaya terus-menerus dan terus-menerus untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dalam jangka panjang dan dalam situasi non-krisis.

2. *Immediate Deterrence* merupakan upaya jangka pendek yang lebih mendesak untuk mencegah serangan spesifik yang akan segera terjadi, paling sering selama krisis.

Extended Deterrence juga berfungsi sebagai nonproliferasi. Senjata nuklir adalah komponen inti dari keseluruhan kemampuan NATO untuk pencegahan dan pertahanan bersama pasukan pertahanan konvensional dan rudal. Konsisten dengan komitmen kami untuk tetap menjadi aliansi nuklir selama senjata nuklir ada, Sekutu setuju untuk mengembangkan konsep bagaimana memastikan partisipasi seluas mungkin dari Sekutu terkait dalam pengaturan pembagian nuklir mereka. AS juga menyediakan payung nuklir atas beberapa mitra Pasifik termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Australia.¹⁰

Kredibilitas *extended deterrence* terletak pada anggapan bahwa kekuatan superior dari negara yang kuat akan membantu kekuatan negara yang kurang kuat (umumnya NNWS) jika negara tersebut menjadi sasaran agresi bersenjata oleh negara kuat

lawan. Ini adalah asumsi dasar di mana Perjanjian Atlantik Utara (NATO), Perjanjian Kerjasama dan Keamanan yang masih diperebutkan antara Amerika Serikat dan Jepang,¹¹ dan Perjanjian ANZUS - bahwa AS akan datang untuk membantu sekutunya, dalam hal terjadi serangan bersenjata oleh negara lawan, dengan atau tanpa ancaman tersirat penggunaan senjata nuklir. Selain itu, kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan strategis di Asia dan relatif menurunnya dominasi AS telah mulai menjadi perhatian sekutu perjanjian AS, khususnya Jepang. Isunya di sini adalah otomatisitas respons pasukan AS terhadap ancaman agresi bersenjata—keyakinan yang diharapkan dapat diberikan oleh perjanjian tersebut—yang berbeda dari ketidakpastian yang dihasilkan oleh *deterrence*. Kredibilitas komitmen AS untuk membela sekutunya di Asia (dan antipodean) bertumpu pada dominasi konvensional AS dan keyakinan bahwa Tiongkok tidak akan memulai penggunaan senjata nuklir. Perubahan dalam keseimbangan konvensional telah mengurangi kredibilitas *extended deterrence* AS.

Jepang sekarang siap untuk meningkatkan upayanya sendiri untuk meningkatkan kredibilitas pencegahan yang diperluas AS, mengesampingkan sikap ambivalen yang telah lama dipegang untuk menjauhkan diri dari strategi nuklir AS, sambil mengandalkannya untuk mencegah ancaman senjata nuklir. Strategi Keamanan Nasional yang diadopsi oleh pemerintah

¹⁰ Williams, L.F., 1987. Under the nuclear umbrella. *Social Work*, pp.246-249.

¹¹ McIntyre, W., 1994. *Background to the Anzus Pact: Policy-Makers, Strategy and Diplomacy, 1945-55*. Springer.

han koalisi Perdana Menteri Abe Shinzo yang dipimpin oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) mengakui bahwa “*Extended Deterrence* dari Amerika Serikat dengan pencegahan nuklir pada intinya sangat diperlukan” untuk keamanan Jepang terhadap serangan nuklir. ancaman kontingensi senjata nuklir. Ia juga menekankan kesiapan negara itu untuk “*Cooperation*” dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kredibilitas *Extended Deterrence*, termasuk upaya Jepang sendiri untuk pertahanan rudal balistik (BMD). Strategi Keamanan Nasional adalah pernyataan kebijakan pertama dari jenisnya untuk Jepang, yang menggantikan Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional yang telah dipegang Jepang sejak tahun 1957. Pedoman Program Pertahanan Nasional (NDPG) yang baru dan kelima yang diadopsi pada saat yang sama menyatakan pengakuan yang sama sehubungan dengan AS memperluas pencegahan dan menyatakan bahwa Jepang akan “bekerja sama” dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kredibilitasnya.¹²

Pergeseran kebijakan Jepang, bagaimanapun, tidak disebabkan oleh melemahnya sentimen publik terhadap senjata nuklir. Sebaliknya, sentimen anti-nuklir dalam konteks yang lebih luas, termasuk opini negatif tentang pembangkit listrik tenaga nuklir, semakin menguat pasca-kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi pada 11 Maret 2010. Oleh karena itu, lebih penting lagi bahwa NDPG 2010 yang

¹² Jimbo, K., Japan’s National Defense Program Guideline (NDPG) and Prospects for Korean Peninsular Security.

berisi pendekatan positif terhadap penangkalan yang diperluas AS termasuk pencegah nuklir sebagai elemen vital diadopsi sembilan bulan setelah kecelakaan Fukushima.¹³

Perubahan sikap Jepang terhadap *extended deterrence* AS adalah konsekuensi dari memburuknya keadaan keamanan di satu sisi, dan evolusi strategi pencegahan AS di sisi lain. Meningkatnya potensi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir dan pengembangan rudal Korea Utara telah mengubah persepsi keamanan Jepang yang mendukung pertahanan yang lebih kuat dan kerja sama aliansi yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Secara simbolis, uji coba peluncuran rudal Taepodong di atas Jepang pada tahun 1998 mendorong Jepang untuk memperkuat kerjasama BMD dengan Amerika Serikat. Pengembangan bersama AS-Jepang berikutnya dari pencegat generasi berikutnya, SM-3 Blok II A, adalah salah satu yang paling maju di antara kerja sama BMD sekutu dengan Amerika Serikat.

Dalam kerangka keamanan Jepang-AS saat ini, perluasan pencegahan nuklir Amerika—*Nuclear Umbrella*—berfungsi sebagai jaminan terakhir yang menghalangi penyerang. Tetapi ancaman pembalasan nuklir bukanlah alat serba guna yang dapat menghalangi setiap provokasi yang mungkin dilakukan musuh.

Pada saat yang sama, untuk alasan ini, jika Jepang ingin menghentikan upaya bertahap Tiongkok untuk mengubah fakta di lapangan di Asia

¹³ Ibid

Timur, Jepang perlu menggunakan serangkaian tindakan pencegahan yang mulus, dimulai dengan kegiatan patroli Penjaga Pantai Jepang, yang mencakup berbagai kemampuan perang konvensional Angkatan Laut. Pasukan Bela Diri Jepang, dan akhirnya mengarah ke kemampuan *Nuclear Deterrence* AS.¹⁴

Namun, pada saat yang sama Jepang tahu bahwa program-program ini akan melayani tujuan utama Pyongyang untuk *Deterrence* dan kelangsungan hidup nasional, bukan untuk digunakan terlebih dahulu untuk menyerang Jepang. Objek utama dari sikap *Denial deterrence* Jepang adalah Tiongkok. Tiongkok merupakan ancaman multi-domain terbesar bagi Jepang, termasuk kekuatan konvensional, nuklir, dan dunia maya yang didukung oleh sumber daya ekonomi dan manusia yang melimpah. Jepang menganggap kekuatan Tiongkok sebagai penentu paling menonjol dari kebijakan luar negeri mereka. Ini sebagian berasal dari fakta bahwa inti keamanan Asia Timur di abad ke-21 telah melihat dua kekuatan utama yang membentuk dinamika regional: kekuatan Tiongkok yang tumbuh dan kehadiran AS bersama dengan sekutunya. Lingkungan ancaman tegang, memaksa pengamat dekat urusan keamanan Asia Timur seperti Thomas Christensen untuk mempertimbangkan

Tiongkok dan Jepang dalam keadaan *security dilemma*.¹⁵

Faktanya, Jepang telah mengisyaratkan niatnya untuk menyeimbangkan kekuatan militer Tiongkok melalui penyeimbangan internal dan *Extended deterrence* AS. Keluaran yang sebenarnya, bagaimanapun, sifatnya terbatas, karena beberapa kendala normatif yang saya bahas tentang penggunaan kekuatan di Jepang telah membentuk psikologi para pemimpin nasional untuk meredam elemen ancaman demi opini publik yang sebagian besar mendukung non- misi militer untuk Pasukan Bela Diri. Karya sarjana *Deterrence* seperti Robert Jervis menawarkan wawasan yang berguna tentang ketidakseimbangan yang berkembang dari persepsi ancaman.¹⁶ Artinya, ketegangan yang meningkat antara Tokyo dan Beijing mungkin merupakan fungsi dari salah persepsi kronis dan spiral kontingensi yang berasal dari rasa tidak aman yang lazim di kedua sisi Laut Jepang. Jika ada, salah persepsi tentang ancaman timbal balik mungkin banyak berkaitan dengan cara kedua negara menafsirkan tindakan masing-masing melalui lensa sejarah dan proyeksi yang menyimpang dari niat satu sama lain, membuat langkah rasional apa pun untuk menghalangi yang lain dengan ancaman *denial*.¹⁷

Kedamaian dan keamanan sangat penting bagi orang Jepang untuk

¹⁴ Green, M., Hicks, K., Cooper, Z., Schaus, J. and Douglas, J., 2017. Countering coercion in maritime Asia: The theory and practice of gray zone deterrence.

¹⁵ Wirtz, J.J., 2005. Disarmament, deterrence, and denial. *Comparative Strategy*, 24(5), pp.383-395.

¹⁶ Jervis, R., 1982. Deterrence and perception. *International security*, 7(3), pp.3-30.

¹⁷ *Ibid*

hidup dengan rasa aman dan terus makmur, tetapi hanya berharap untuk hal-hal ini tidak cukup untuk menjamin keamanan. Oleh karena itu, Jepang menjamin perdamaian dan keamanannya dengan memperkuat hubungan aliansi Jepang-AS, serta kemampuan pertahanannya sendiri, dan dengan mengembangkan postur pertahanan yang kuat. Selain itu, dari segi *deterrence* munculnya ancaman terhadap Jepang, pentingnya peran yang dimainkan oleh kemampuan pertahanan meningkat dalam upaya Kerjasama di kawasan Indo-Pasifik. Menyadari peran kemampuan pertahanan tersebut, Jepang memastikan perdamaian dan keamanannya dengan mengerahkan upaya di berbagai bidang, termasuk diplomasi dan ekonomi. Selain itu, berdasarkan konstitusinya, Jepang telah secara efisien membangun sistem yang sangat efektif, kekuatan pertahanan terpadu sejalan dengan prinsip-prinsip dasar mempertahankan kebijakan berorientasi pertahanan.¹⁸

Jepang saat ini sedang menyusun Strategi Keamanan Nasional baru, dll. Dari perintah Perdana Menteri Kishida, Pemerintah akan menetapkan strategi baru ini dengan berani dan kreatif, berpikir secara fleksibel di luar paradigma yang ada untuk mencegah perubahan status quo secara dini dengan kekuatan dan juga sepenuhnya siap untuk perang modern, termasuk perang informasi dan perang *cyber*. Kemampuan *deterrence* ancaman dari Jepang dengan membuat

¹⁸ Wallace, C.J., (2013). Japan's strategic pivot south: diversifying the dual hedge. *International Relations of the Asia-Pacific*, 13(3), hlm.479-517.

lawan menyadari bahwa merugikan Jepang akan sulit dan konsekuensial.¹⁹

Mengingat situasi di mana lingkungan keamanan di sekitar Jepang tumbuh semakin parah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Jepang perlu secara dramatis memperkuat kemampuan pertahanannya. Tidak mungkin untuk secara akurat membandingkan jumlah belanja pertahanan dari negara-negara karena sejumlah faktor: tidak ada definisi internasional yang seragam tentang belanja pertahanan; bahkan jika pengeluaran pertahanan diungkapkan kepada publik, jumlah total atau rinciannya terkadang tidak jelas; dan sistem anggaran berbeda-beda di setiap negara. Atas dasar itu, jika pembelanjaan pertahanan Jepang dibandingkan dengan pembelanjaan pertahanan yang diterbitkan secara resmi oleh negara lain, maka Jepang memiliki rasio pembelanjaan pertahanan terhadap PDB yang paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara G7, Australia, dan Republik Korea (ROK). Selain itu, Australia, ROK, Inggris, Prancis, dan Jerman semuanya menghabiskan sekitar dua hingga tiga kali lipat pengeluaran pertahanan per orang dibandingkan Jepang.

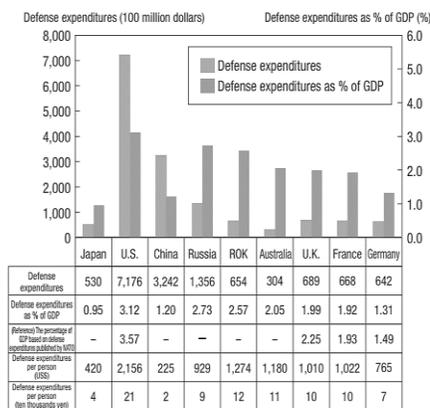
Untuk itu, Jepang telah menyiapkan anggaran tahunan untuk TA 2022 dan anggaran tambahan untuk TA 2021 bersama sebagai “*Defense Strengthening Acceleration Package*”²⁰ yang terintegrasi. Selain itu,

¹⁹ Ibid

²⁰ Smith, S.A., (2019). *Japan rearmed: The politics of military power*. Harvard University Press.

untuk mengamankan keunggulan teknologi, Jepang telah memutuskan untuk secara signifikan meningkatkan investasi dalam teknologi yang berpotensi meningkatkan pengeluaran R&D ke rekor tertinggi. Anggaran tahunan FY2022 adalah 5,1788 triliun yen, naik 55,3 miliar yen (1,1%) dari tahun sebelumnya, atau 5,4005 triliun yen jika dana yang terkait dengan penataan kembali pasukan AS disertakan. Pengeluaran pertahanan Jepang telah mencatat rekor untuk tahun kesepuluh berturut-turut.

Gambar 1.2 Japan Defense Expenditure (% GDP)



Perubahan signifikan lainnya dalam sikap Jepang terhadap AS mengenai *extended deterrence* adalah partisipasi Tokyo baru-baru ini dalam dialog dengan Washington tentang strategi *deterrence*, termasuk pencegahan nuklir, proses yang telah lama ditolak Jepang sendiri dengan menjauhkan diri dari strategi nuklir AS. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Amerika Serikat mengadakan bilateral *Extended Deterrence Dialogue (EDD)* di King's Bay Naval Base di Georgia pada tanggal 21-22 Juni 2022.

Pihak Jepang diketuai oleh Mr. Kanai Masaaki, Wakil Direktur Jenderal, Biro Urusan Amerika Utara, Kementerian Luar Negeri, dan Mr. Yamato Taro, Wakil Direktur Jenderal, Biro Kebijakan Pertahanan, Kementerian Pertahanan, sementara pihak AS diketuai oleh Ms. Alexandra Bell, Asisten Deputi Sekretaris, Biro Kontrol Senjata, Verifikasi dan Kepatuhan, Departemen Luar Negeri, dan Tuan Richard Johnson, Wakil Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Senjata Nuklir dan Penangkal Pemusnah Massal serta Departemen Pertahanan.²¹

Putaran EDD ini mengikuti KTT Pemimpin AS-Jepang Mei 2022, di mana Presiden Biden dan Perdana Menteri Kishida Fumio menggaris-bawahi pentingnya meningkatkan diskusi bilateral tentang *extended deterrence*. Selama EDD, Amerika Serikat dan Jepang berbagi penilaian tentang lingkungan keamanan regional, dan pihak AS memberikan pengarahannya tentang keadaan kemampuan nuklir AS saat ini, termasuk postur dan program modernisasi triad nuklirnya, serta kebijakan deklaratifnya, berdasarkan Tinjauan Postur Nuklir yang baru saja selesai.

Sebagai bagian dari EDD, para delegasi mengunjungi kapal selam kelas Ohio USS Maryland. Pencegahan yang diperluas membentuk inti dari Aliansi Jepang-AS. EDD, yang didirikan pada 2010, memberi Tokyo dan

²¹ Roberts, B., 2013. *Extended Deterrence and Strategic Stability in Northeast Asia*. NIDS Visiting Scholar Paper Series, 1. <http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/visiting/pdf/01.pdf> diakses 7 april 2022

Washington proses yang teratur untuk membahas cara-cara mempertahankan dan memperkuat pencegahan yang diperluas. Kedua belah pihak mengadakan diskusi mendalam tentang pencegahan yang diperluas dan bagaimana kontrol senjata, nonproliferasi, pasukan konvensional dan pertahanan rudal berkontribusi pada pencegahan terpadu serta pencegahan yang lebih kredibel dan tangguh.

Di sini sekali lagi, kebijakan AS untuk mengurangi peran senjata nuklir dalam strategi pencegahan telah membuat Jepang secara politis lebih mudah untuk berpartisipasi dalam konsultasi tersebut. Memang, sedikit kritik domestik disuarakan atas keterlibatan Tokyo hingga saat ini dalam dialog dengan Washington tentang pencegahan yang diperpanjang. Proses Tinjauan Postur Nuklir (NPR) 2010 pemerintahan Obama memberikan kesempatan yang lebih dari sebelumnya bagi pejabat pemerintah Jepang untuk secara rahasia menyajikan pandangan Jepang tentang postur nuklir AS. Di Capitol Hill, Komisi Kongres tentang Postur Strategis Amerika Serikat, yang mendengar dari Jepang dan pejabat asing lainnya, menekankan dalam laporan terakhirnya yang diterbitkan pada tahun 2009²² pentingnya membangun “dialog yang jauh lebih luas dengan Jepang mengenai nuklir,” menambahkan, “Dialog seperti itu dengan Jepang juga akan meningkatkan kredibilitas *Extended Deterrence*.” Konsultasi awal antara pejabat kebijakan luar negeri

²² Lonsdale, D.J., 2019. The 2018 Nuclear Posture Review: A return to nuclear warfighting?. *Comparative Strategy*, 38(2), pp.98-117.

dan pertahanan kedua negara, yang dimulai dengan undangan dari pihak AS, ternyata produktif bagi Washington dan Tokyo, sehingga kedua pemerintah sepakat pada tahun 2010 untuk melembagakan proses yang mereka namakan *Extended Deterrence Dialogue*.

Mengingat bahwa konsep *extended deterrence* AS itu sendiri akan memerlukan penyesuaian dan redefinisi agar dapat bertahan di bawah kondisi geopolitik global dan regional yang berubah, akan sangat penting bagi Tokyo untuk berpartisipasi dalam pembuatan strategi (atau strategi) pencegahan bersama dengan Washington dari posisi penerima AS diperpanjang pencegahan. Pertanyaan menantang di hadapan mereka sudah banyak, termasuk pertanyaan seperti bagaimana mendefinisikan “stabilitas strategis” di antara Amerika Serikat (dan Inggris dan Prancis di pihaknya), Rusia dan Tiongkok dalam istilah bilateral dan trilateral, bagaimana “menyesuaikan” strategi pencegahan terhadap kondisi geopolitik regional yang berbeda, dan bagaimana membawa kemampuan konvensional yang maju dan teknologi baru ke dalam konsep keseimbangan strategis.²³

Di antara mereka, pertanyaan yang disebutkan sebelumnya tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan saling ketergantungan ekonomi dan kerja sama politik dengan Tiongkok dan persyaratan untuk melakukan lindung nilai terhadap kekuatan militernya yang sedang tumbuh akan menjadi yang paling menan-

²³ Ibid

tang dalam mendefinisikan ulang konsep pencegahan. Karena tidak seperti kasus strategi pencegahan terhadap Uni Soviet masa Perang Dingin, akan sangat sulit untuk secara terbuka mengkonseptualisasikan di masa damai sebuah strategi pencegahan yang bertujuan untuk melindungi terhadap kemungkinan hipotetis bahwa hubungan kooperatif atau non-permusuhan dengan Beijing mungkin berubah menjadi konfrontatif atau yang bermusuhan.

Tugas penting lainnya di hadapan pemerintah Jepang dan AS adalah menghubungkan Dialog Pencegahan yang Diperpanjang tentang strategi dan proses untuk meninjau Pedoman Kerjasama Pertahanan dalam struktur konsultasi aliansi yang diselenggarakan di bawah apa yang disebut Pertemuan Tingkat Menteri Dua-Plus-Dua antara Jepang Menteri Luar Negeri dan Pertahanan, dan Sekretaris Negara dan Pertahanan AS.

Tinjauan bersama yang sedang berlangsung terhadap Pedoman Kerja Sama Pertahanan tampaknya dilakukan secara terpisah dari Dialog Pencegahan yang Diperpanjang, yang baru saja dimulai. Tetapi perlu untuk menghubungkan kedua proses untuk membuat masa depan, jika bukan yang berikutnya, pedoman mencerminkan strategi pencegahan bersama untuk dikonseptualisasikan melalui proses Dialog Pencegahan yang Diperpanjang. Ini akan menjadi penting untuk membuat kerjasama pertahanan antara SDF Jepang dan pasukan AS sedemikian rupa sehingga akan lebih

baik melayani tujuan strategi pencegahan bersama antara kedua negara.²⁴

Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk mencegah perang. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama kita harus memikirkan bentuk-bentuk *deterrence* yang melibatkan keseimbangan kekuatan melawan kekuatan untuk mencapai keseimbangan. Situasi di mana calon lawan, yang keduanya dipersenjatai dengan kemampuan militer canggih, untuk tetap berada dalam hubungan yang tegang satu sama lain adalah risiko tersendiri. Oleh karena itu, Jepang juga harus mempertimbangkan mekanisme untuk meningkatkan komunikasi di saat krisis—tidak hanya dengan Tiongkok, tetapi juga dengan Taiwan, Korea Selatan, dan aktor lainnya—untuk menghindari perang tak disengaja yang tidak diinginkan siapa pun.

Di tingkat regional juga, Jepang harus menegaskan kembali prinsip mencari resolusi damai untuk konflik dan mengeksplorasi kemungkinan kontrol senjata dan perlucutan senjata, sambil terus memperhatikan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Mungkin bermanfaat untuk mencari contoh ke Eropa di era Perang Dingin. Sejak tahun 1970 dan seterusnya, negara-negara Eropa terlibat dalam berbagai dialog, latihan membangun kepercayaan, dan forum serta rezim untuk pengendalian senjata dan perlucutan senjata. Jepang harus memainkan peran utama dalam membentuk forum serupa untuk dialog yang

²⁴ Mochizuki, M.M., 1984. Japan's search for strategy. *International Security*, 8(3), pp.152-179.

bertujuan untuk stabilitas yang lebih besar di kawasan Asia Timur.

PENUTUP

Semua kemungkinan tidak sama. Secara khusus, secara analitis berguna untuk membedakan kemungkinan-kemungkinan yang kita ketahui tentang sesuatu, apa saja, dan hal-hal yang tidak kita sadari. (Contoh yang realistis adalah badai yang menyerang pada waktu sebelum prakiraan cuaca dan pemeliharaan catatan sejarah.) Karena peristiwa-peristiwa ini pada dasarnya di luar lingkungan kognitif langsung kita, mereka tidak dapat mempengaruhi, *ex ante*, perilaku strategis kita. Jelas jenis kontingensi ini penting karena peristiwa-peristiwa ini bahkan tidak dipertimbangkan oleh aktor-aktor strategis sebelum terjadinya, membuat generalisasi tentang efek badai yang tidak terduga atau pengaruh eksternal fundamental lainnya pada perilaku manusia menjadi sulit dan nilainya terbatas.

Perencanaan strategis jangka panjang Jepang akan terus memperhatikan tantangan kontingensi yang ditimbulkan oleh kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang meningkat. Para pembuat kebijakan di Tokyo akan mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai inisiatif keamanan sambil menjaga agar strategi AS di Asia tetap berlabuh di Jepang. Postur pertahanan Jepang akan tetap multilateral, dan Tokyo akan terus bergantung pada Washington untuk kemampuan proyeksi kekuatan dan penangkal nuklir daripada mengembangkannya sendiri.

Jepang bergerak menjauh dari pasifisme pascaperangnya dengan menjadi lebih terlibat dalam upaya keamanan maritim, membantu misi penjaga perdamaian PBB, menggunakan aset militer dalam tanggap bencana, menangani secara tegas Korea Utara, dan menunjukkan *security dilemma* yang terlihat vis-à-vis Tiongkok. Ini menjadi pertanda baik bagi peran keamanan internasional Jepang dan bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam P. Liff, "How Specifically Does Japan's LDP Want to Revise the Constitution?" *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/07/how-specifically-does-japans-ldp-want-to-revise-the-constitution/>
- Dugis, V. (Ed.). (2018). *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press.
- Green, M., Hicks, K., Cooper, Z., Schaus, J., & Douglas, J. (2017). *Countering coercion in maritime Asia: The theory and practice of gray zone deterrence*.
- Japan Ministry of Defense. (2017). *Defense programs and budget of Japan: Overview of FY2017 budget*.
- Jervis, R. (1982). *Deterrence and perception*. *International security*, 7(3), 3-30.

- Jimbo, K. Japan's National Defense Program Guideline (NDPG) and Prospects for Korean Peninsular Security.
- Keohane, R. O. (1986). *Neorealism and its Critics*. Columbia University Press.
- McIntyre, W. (1994). Background to the Anzus Pact: Policy-Makers, Strategy and Diplomacy, 1945-55. Springer.
- Mochizuki, M. M. (1984). Japan's search for strategy. *International Security*, 8(3), 152-179.
- Roberts, B. (2013). Extended Deterrence and Strategic Stability in Northeast Asia. *NIDS Visiting Scholar Paper Series, 1*.
- Smith, S. A. (2019). *Japan rearmed: The politics of military power*. Harvard University Press.
- Ullman, R. H. (1983). Redefining security. *International security*, 8(1), 15-21.
- Umeda, S. (2006). *Japan, Article 9 of the Constitution*. Law Library of Congress.
- Wallace, C. J. (2013). Japan's strategic pivot south: diversifying the dual hedge. *International Relations of the Asia-Pacific*, 13(3), 479-517.
- Williams, L. F. (1987). *Under the nuclear umbrella*. *Social Work*, 246-249.
- Lonsdale, D. J. (2019). The 2018 *Nuclear Posture Review: A return to nuclear warfighting?*. *Comparative Strategy*, 38(2), 98-117.
- Wivel, A. (2011). *Security dilemma*. *International Encyclopedia of political science*, 7, 2389-91.
- Yoshida, F. (2018). *From the reality of a nuclear umbrella to a world without nuclear weapons: an interview with Katsuya Okada*. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1(2), 474-485.